



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siapkan Talangan 20 Persen Uang Muka Rumah

Dasar hukumnya ditargetkan terbit Oktober ini.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan uang muka program rumah tarpa uang muka atau *down payment* (DP) nol rupiah senilai 20 persen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Melly Budiasuti, mengatakan dana talangan itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. "Alokasi anggarannya sudah ada," kata dia, kemarin.

Melly menjelaskan, untuk tahap awal, pemerintah DKI mengalokasikan Rp 717 miliar dalam APBD 2018 Perubahan. Dari total itu, dana untuk talangan uang muka rumah sekitar Rp 160 miliar. Sisanya digunakan untuk pembiayaan kredit perumahan.

Menurut Melly, alokasi dana tersebut cukup untuk menalangi uang muka rumah murah yang sedang dibangun Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Badan usaha milik pemerintah DKI itu membangun 703 unit rumah dalam bentuk hunian vertikal. Proyek bernama Pondok Klapa Village itu berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Penyaluran talangan uang muka, kata Melly,

Jurus Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pembeli unit rumah harus mengembalikan dana talangan bersamaan dengan pembayaran cicilan. Nilai, porsi, dan mekanisme pengembaliannya ditentukan dalam peraturan gubernur yang sedang disusun. Saat ini, ada tiga peraturan gubernur yang disiapkan. Rancangannya sudah diserahkan ke Gubernur Anies Baswedan dan direncanakan terbit Oktober ini.

Melly menambahkan, proses seleksi calon pembeli unit rumah mengikuti persyaratan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Persyaratan tersebut, antara lain unit rumah yang dibeli wajib dilindungi. Berbeda dengan rumah komersial yang dibangun pengembang, transaksi untuk rumah secara inden tak dibolehkan. Transaksi jual-beli unit rumah DP nol rupiah pun baru bisa dilakukan setelah rumah selesai terbangun.

Perbedaannya, uang muka dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bukan dana talangan. Pemerintah pusat membiayai pembangunan rumah yang penyalurannya dilakukan oleh bank pelaksana. Proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan, yakni 75:25 persen.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yony C Pinontoan, mengatakan proyek Pondok Klapa Village ditargetkan rampung Juli tahun depan. Perhangunan rumah susun untuk program rumah DP nol rupiah itu kini memasuki tahap akhir pengerjaan struktur bawah. "Akhir tahun ini targetnya sudah *topping off*," kata dia.

Pondok Klapa Village dibangun di lahan seluas 1,1 hektare milik Sarana Jaya seluas 1,4 hektare. Ini menjadi proyek pertama program rumah DP nol rupiah. Satu *block* rumah susun itu lingginya 20 lantai dengan total 703 unit. Sarana Jaya membaginya menjadi dua tipe. Sebanyak 503 unit merupakan unit tipe 36 berisi dua kamar yang dijual Rp 320 juta. Sisanya, 196 unit tipe 21 dengan satu kamar, dijual Rp 185 juta.

Anggota Komisi Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, meminta Dinas Perumahan memastikan sosialisasi mekanisme pembelian unit rumah murah itu. "Apalagi masyarakat harus membayar uang muka, meski programnya bernama program rumah DP nol rupiah." Masyarakat harus paham sejak awal supaya tak ada kebingungan lagi," kata dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siapkan Talangan 20 Persen Uang Muka Rumah

Mundur Enam Bulan

Penerbitan dasar hukum program rumah tanpa uang muka alias *down payment* (DP) nol rupiah bakal dikaji mundur. Sewaktu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menargetkan peraturan gubernur tentang skema pembiayaan program rumah murah itu rampung sebelum akhir April lalu. Dengan begitu, kata Sandiaga kala itu, pemasaran unit rumah DP nol rupiah bisa dimulai pada Mei 2018.

Faktanya, hingga hari ini, peraturan gubernur tersebut belum terbit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Melly Budiastuti, mengatakan peraturan gubernur tersebut bakal terbit Oktober ini.

Melly menjelaskan, bakal ada tiga peraturan gubernur tentang program rumah DP nol rupiah. Peraturan gubernur itu akan mengatur pembentukan kelembagaan badan layanan umum daerah, skema pembiayaan, dan persyaratan pembeli unit rumah murah. "Sekarang rancangannya sudah selesai," kata dia, kemarin.

Menurut Melly, penerbitan dasar hukum rumah DP nol rupiah mundur lantaran pemerintah DKI harus berdiskusi dulu dengan para pemangku kepentingan program tersebut. Di samping itu, pemerintah perlu membahas pelbagai skema pembayaran lain di luar fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk ditampung dalam peraturan gubernur tersebut. • LINDY HARANI